

Perubahan
**Rencana
Kerja**
TAHUN 2024



INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2024
100 33 -2/645
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahunan daerah, Perangkat Daerah tiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu pengaturan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo taun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan:
- Dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo untuk tahun 2024;
 - Landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purworejo tahun 2024 dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- k. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo;
- q. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- r. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
- s. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- t. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo;
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
- x. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
- z. Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;

- aa. Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
- bb. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- cc. Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
- dd. Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo;
- ee. Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- ff. Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- gg. Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- hh. Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- ii. Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- jj. Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- kk. Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
- ll. Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
- mm. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- nn. Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
dan
- oo. Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO



YULI HASTUTI

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2024 100.3.32/645/2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

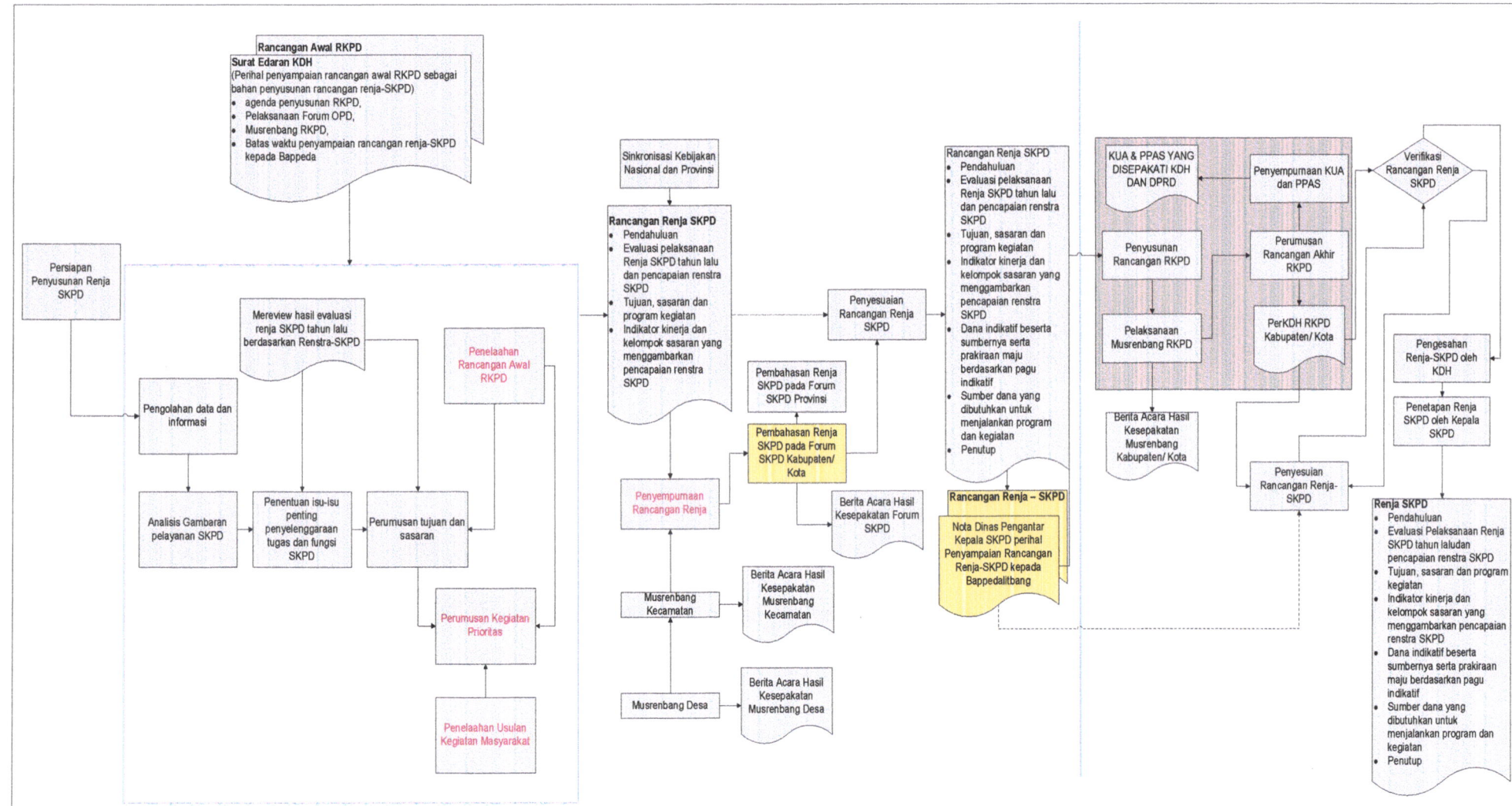
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). UU Nomor 25 tahun 2004 pada pasal 7 juga menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan-tahapan penyusunan tersebut meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pelaksanaan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Tahapan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah



Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional memiliki saling keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lain. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya serta melihat dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program kegiatan dilakukan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun perencanaan.

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan Perangkat Daerah secara lebih kongkrit dan terukur. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun tersebut apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan Kondisi tersebut meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 telah

menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Seiring dengan pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II ternyata terdapat berbagai perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan yang mempengaruhi tercapainya target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat pada tahun 2024. Atas dasar hal tersebut maka Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 untuk menyesuaikan kembali perencanaan yang sudah berjalan dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga target sasara kinerja tahun 2024 dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 82 Seri D Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 144 Seri E Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 80 Seri E Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perkembangan yang terjadi pada saat ini yang mempengaruhi perencanaan sebelumnya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tersebut agar dapat mengakomodir perkembangan pada saat ini sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mengevaluasi Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan triwulan II;
- c. Memenuhi ketentuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKAP) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja memperhatikan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/ kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan 3 program, 12 kegiatan. dan 54 Sub kegiatan. Adapun capaian target dan realisasi kinerja program Inspektorat sampai dengan triwulan II, adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pogram/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, secara umum kegiatan dapat memenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan, karena telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran dan target kinerja menyesuaikan kebutuhan dan perubahan jadwal kinerja.

Adapun program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II antara lain:

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terdapat perubahan jadwal pelaksanaan karena adanya penyesuaian agenda kegiatan para peserta/pejabat fungsional dan narasumber kegiatan.

- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dan sub kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat perubahan rincian obyek belanja menyesuaikan kebutuhan komponen istrik sehingga proses pengadaan barang jasa secara e-purchasing mengalami keterlambatan. Selain itu untuk sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD terdapat agenda rapat koordinasi penataan arsip yang belum dapat terlaksana karena menyesuaikan jadwal monitoring dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Purworejo.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, pencapaian target keluaran kegiatan telah terpenuhi semua selain dua kegiatan diatas yang tidak tercapai target kinerjanya. Pada Triwulan II ini terdapat sub kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan yaitu Reviu Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan pada kegiatan Pengawasan Internal.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II, program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat jika dilihat dalam laporan evaluasi renja dan terdapat subkegiatan yang realisasinya melampaui target yang direncanakan yaitu : subkegiatan Reviu Laporan Keuangan telah menyelesaikan 71 laporan hasil Reviu Laporan Keuangan dan subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang telah menyelesaikan 78 laporan hasil PDTT.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai/terpenuhi/melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Inspektorat berkaitan erat dengan tugas pokok yang dimiliki Inspektorat melalui fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi. Selain itu juga terkait dengan pendukung pelaksanaan fungsi Inspektorat baik sarana

prasarana, peningkatan kapabilitas APIP maupun administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan diantaranya:

- Keterlambatan jadwal pengadaan barang jasa yang dibutuhkan oleh Inspektorat dan adanya perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan tidak tepat waktu yang mengakibatkan penyelesaian laporan hasil pengawasan juga terlambat;
- Adanya mandatori penugasan diluar PKPT yang harus dilaksanakan mengakibatkan target pengawasan di PKPT menjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan secara umum yaitu :

- Pelaksanaan subkegiatan sesuai Rencana Kerja Operasional (RKO) yang disusun dan anggaran kas yang direncanakan.
- Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin/berkala untuk memastikan pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang direncanakan dan dapat segera melakukan penyesuaian target kinerja apabila ada perubahan kebijakan.
- Pengawasan internal telah direncanakan dalam dokumen PKPT yang didalamnya telah mempertimbangkan mandatori pengawasan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.
- Beberapa mandatory penugasan baru diperintahkan pada awal tahun dan harus dilaksanakan dengan berbatas waktu dalam penyelesaiannya sehingga dalam penugasan diprioritaskan dalam pelaksanaannya ataupun dengan penugasan tumpang/bersamaan waktunya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- Menambah beban target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya untuk mencapai target program/kegiatan dalam Renstra yang ditetapkan apabila target capaian program/kegiatan tidak terpenuhi.

- Tidak terlaksananya target program/kegiatan maupun mundurnya waktu pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra apabila target capaian program/kegiatan tidak terpenuhi.
 - Realisasi anggaran tidak terealisasi secara maksimal apabila target capaian program/kegiatan tidak optimal.
 - Kurang optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dan dilakukan yaitu :

- Penjadwalan ulang kegiatan yang belum dilaksanakan dengan tetap mengutamakan prinsip 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dalam untuk memaksimalkan capaian output kegiatan.
- Perubahan desain kegiatan yang belum mencapai output kegiatan sesuai kondisi anggaran dan kebutuhan untuk percepatan pencapaian target.
- Perubahan anggaran menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan untuk kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya melalui rekomposisi maupun pergeseran anggaran untuk mendukung capaian output kegiatan.
- Perubahan target capaian program, hasil kegiatan dan keluaran sub kegiatan sesuai kondisi dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.
- Sinkronisasi Perubahan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 yang sudah mengakomodasi mandatory penugasan yang belum masuk dalam rencana penugasan dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Purworejo dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo s/d Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo
Periode Pelaksanaan: sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kenja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)
													I		II												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(12 = 8+9)			(13=12/7*100%)			(14=12/5 x100%)			(15)	(16)
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satua n	Rp	K	Satua n	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satua n	Rp	K	Satua n	Rp		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas		Nilai Area Pengawasan Penguatan	3,19	skor		3,076	skor		3,1	skor		0		0		0	skor	0	0,00%	skor		100%	skor			
	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern		Tingkat Maturitas SPIP	3,5	level		3,309	level		3,31	level		0		0		0	level	0	0,00%	level		95%	level			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	9.856.971.026	100	%	1.420.030.243	100	%	1.475.951.050	25	160.693.145	25	338.404.262	50	%	499.097.407	50,00%	%	33,82%	0%	%	19%	Inspektorat	APbD
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	%	1.610.777.794	100	%	277.253.965	100	%	326.156.850	25	33.642.900	25	44.308.874	50	%	77.951.774	50,00%	%	23,90%	0%	%	22%	Inspektorat	APBD
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal	35	Doku men	9.856.971.026	14	Dokum en	1.420.030.243	7	Doku men	1.475.951.050	2	160.693.145	2	338.404.262	4	Doku men	499.097.407	57,14%	Doku men	33,82%	51%	Doku men	19%	Inspektorat	APBD
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	534	Lapo ran	1.830.533.011	280	Lapora n	264.828.350	100	Lapor an	203.187.650	35	27.243.650	9	31.068.850	44	Lapor an	58.312.500	44,00%	Lapor an	28,70%	61%	Lapor an	18%	Inspektorat	APBD
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	617	Lapo ran	1.127.458.373	310	Lapora n	184.354.300	96	Lapor an	136.103.050	15	5.985.800	27	22.779.000	42	Lapor an	28.764.800	43,75%	Lapor an	21,13%	57%	Lapor an	19%	Inspektorat	APBD
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	Lapo ran	205.122.457	3	Lapora n	4.434.600	1	Lapor an	22.708.300	1	17.783.500	1	3.040.300	2	Lapor an	20.823.800	100,00%	Lapor an	91,70%	83%	Lapor an	12%	Inspektorat	APBD
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	273	Lapo ran	690.616.723	62	Lapora n	92.870.800	30	Lapor an	109.173.750	71	87.161.000	0	11.935.250	71	Lapor an	99.096.250	100,00%	Lapor an	90,77%	49%	Lapor an	28%	Inspektorat	APBD
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	321	Lapo ran	1.113.947.288	188	Lapora n	138.094.132	98	Lapor an	268.721.300	1	7.930.195	41	44.553.203	42	Lapor an	52.483.398	42,86%	Lapor an	19,53%	100%	Lapor an	17%	Inspektorat	APBD
		Kerja Sama Pengawasan Internal	~Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8	Kesepa katan	295.003.463	4	Kesepa katan	43.883.843	2	Kesepa kata n	41.048.350	0	375.000	0	3.008.950	0	Kesepa kata n	3.383.950	0,00%	Kesepa kata n	8,24%	50%	Kesepa kata n	16%	Inspektorat	APBD

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)						(9)			(10-12/7-100%)			(11-12/5-100%)			(15)	(16)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				320	Doku men	4.594.289.710	284	Dokum en	691.564.218	6	Doku men	695.008.650	0	14.214.000	0	222.018.709	0	Doku men	236.232.709	0,00%	33,99%	100%	Doku men	20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)				Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10=12/5 x 100%)		(11=12/7 x 100%)		(12=12/5 x 100%)		(15)	(16)					
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan			Rp				
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	675	Peran gkat Daerah	1.993.118.751	237	Perang kat Daerah	37.203.581	190	peran gkat daerah	414.407.400	16	100.156.000	39	60.831.900	55	160.987.900	28,95%	Peran gkat Daerah	38,85%	43%	Peran gkat Daerah	10%	Inspektorat	APBD
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18	Kegiat an	4.415.187.521	9	Kegiatan	479.344.270	2	Kegiatan	821.051.400	2	131.690.750	1	148.756.600	3	280.447.350	100,00%	Kegiatan	34,16%	67%	Kegiatan	17%	Inspektorat	APBD
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	667	Peran gkat Daerah	1.410.935.260	219	Perang kat Daerah	62.430.470	165	peran gkat daerah	195.447.100	82	7.609.854	82	9.569.189	164	17.179.043	99,39%	Peran gkat Daerah	8,79%	57%	Peran gkat Daerah	6%	Inspektorat	APBD
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5			84,33			83,5			0		83,6		83,5		100,00%			100%				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5			84,33			83,5			0		83,6		83,5		100,00%			100%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERBITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	62.548.355.109	100	%	12.836.749.757	100	Perse n	12.201.503.238	25	1.983.225.197	25	4.057.586.177	50,0	6.040.811.374	50,00%		49,51%	150%		30%	Inspektorat	APBD
		Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Dok ume n	517.206.474	14	Doku men	70.473.700	3	Doku men	38.509.000	3	-	0	20.140.300	3	20.140.300	100,00%	Doku men	52,30%	74%	Doku men	18%	Inspektorat	APBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89	Doku men	250.111.755	30	Dokum en	34.910.400	19	Doku men	25.325.900	8	-	1	15.797.200	9	15.797.200	47,37%	Doku men	62,38%	44%	Doku men	20%	Inspektorat	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Doku men	66.210.474	2	Dokum en	3.086.350	0	Doku men	-	0	-	0	-	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	5%	Inspektorat	APBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Doku men	14.258.806	2	Dokum en	2.346.550	0	Doku men	-	0	-	0	-	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	16%	Inspektorat	APBD	

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)
													I		II												
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(12 = 8+9)			(13=12/7*100%)			
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Doku men	21.135.226	2	Dokum en	2.596.350	0	Doku men	- 0	- 0	- 0	- 0	Doku men	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	12%	Inspektorat	APBD		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Doku men	16.231.231	2	Dokum en	2.346.550	0	Doku men	- 0	- 0	- 0	- 0	Doku men	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	14%	Inspektorat	APBD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	Lapo ran	21.829.385	32	Lapora n	3.330.500	16	Lapor an	1.705.000	3	- 4	549.000	7	Lapor an	549.000	43.75%	Lapor an	32.20%	49%	Lapor an	18%	Inspektorat	APBD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Lapo ran	127.429.597	9	Lapora n	21.857.000	3	Lapor an	11.478.100	3	- 0	3.794.100	3	Lapor an	3.794.100	100,00%	Lapor an	33,06%	52%	Lapor an	20%	Inspektorat	APBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Adminstras iKeuangan Perangkat Daerah	100	%	45.595.743.173	100	%	8.729.712.969	100	%	9.889.283.838	25	1.960.574.091	50	3.316.473.572	50	Prose ntase	5.277.047.663	50,00%	Prose ntase	53,36%	100%	Prose ntase	31%	Inspektorat	APBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	319	Oran g/bu lan	45.516.465.054	132	Orang/ bulan	8.718.681.369	70	Oran g/bul an	9.877.505.788	65	1.960.574.091	65	3.313.935.122	65	Orang /bula n	5.274.509.213	100,00%	Oran g/bul an	53,40%	62%	Orang /bula n	31%	Inspektorat	APBD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penntausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Doku men	39.389.210	24	Dokum en	5.976.600	12	Doku men	5.426.150	3	- 3	2.041.450	6	Doku men	2.041.450	50,00%	Doku men	37,62%	50%	Doku men	20%	Inspektorat	APBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30	Lapo ran	21.312.484	12	Lapora n	2.562.600	6	Lapor an	4.027.900	0	- 0	497.000	0	Lapor an	497.000	0,00%	Lapor an	12,34%	40%	Lapor an	14%	Inspektorat	APBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	130	Lapo ran	18.576.424	52	Lapora n	2.492.400	26	Lapor an	2.324.000	6	- 7	- 13	Lapor an	0	50,00%	Lapor an	0,00%	50%	Lapor an	13%	Inspektorat	APBD		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100	%	27.137.982	100	%	3.232.200	100	%	4.693.600	25	1.000.000	50	2.080.250	50	%	3.080.250	50,00%	%	65,63%	100%	%	23%	Inspektorat	APBD

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra, Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Berakhir Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)						(9)						(10+12/7*100%)			(11+12/5*100%)			(15)	(16)
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9	Doku men	13.861.376	3	Dokum en	2.116.200	1	Doku men	2.027.400	0	-	0	1.215.450	0	Doku men	1.215.450	0,00%	0,00%	59,95%	33%	Doku men	24%	Inspektorat	APBD					
		Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9	Lapo ran	13.276.606	3	Lapora n	1.116.000	1	Lapo ran	2.666.200	0	1.000.000	0	864.800	0	Lapo ran	1.864.800	0,00%	0,00%	69,94%	33%	Lapo ran	22%	Inspektorat	APBD					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	7.992.121.065	100	%	1.292.776.833	100	%	1.377.659.350	25	2.160.000	50	370.383.458	50	%	372.543.458	50,00%	%	27,04%	100%	%	21%	Inspektorat	APBD					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Pake t		1	Paket	50.029.004	0	Paket	-	0	-	0	-	0	Paket	0	0,00%	0,00%		100%	Paket	100%	Inspektorat	APBD					
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Doku men		1	Dokum en	-	0	Doku men	-	0	-	0	-	0	Doku men	0	0,00%	0,00%		0%	Doku men	0%	Inspektorat	APBD					
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Doku men	755.368.154	2	Dokum en	119.569.016	1	Doku men	79.661.500	0	-	0	20.488.336	0	Doku men	20.488.336	0,00%	0,00%	25,72%	40%	Doku men	19%	Inspektorat	APBD					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	490	Doku men	7.064.605.941	136	Dokum en	1.045.421.033	70	Oran g	1.272.916.600	4	2.160.000	36	339.106.822	40	Oran g	341.266.822	57,14%	Oran g	26,81%	36%	Oran g	20%	Inspektorat	APBD					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	520	Oran g	61.222.445	177	Oran g	12.826.780	70	Oran g	9.696.750	65	-	0	2.010.000	65	Oran g	2.010.000	92,86%	Oran g	20,73%	47%	Oran g	24%	Inspektorat	APBD					
		Binibungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Binibungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430	Oran g	110.924.525	112	Oran g	64.931.000	70	Oran g	15.384.500	0	-	45	8.778.300	45	Oran g	8.778.300	64,29%	Oran g	57,06%	37%	Oran g	66%	Inspektorat	APBD					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.958.595.406	100	%	321.335.274	100	Perse n	296.647.450	25	4.094.500	50	87.971.100	50	%	92.065.600	50,00%	%	31,04%	100%	%	21%	Inspektorat	APBD					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Pake t	83.067.984	3	Paket	6.898.000	1	Paket	8.906.900	0	-	0	-	0	Paket	0	0,00%	0,00%		43%	Paket	8%	Inspektorat	APBD					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Pake t	17.075.310	2	Paket	1.725.000	1	Paket	14.149.200	0	-	0	-	0	Paket	0	0,00%	0,00%		40%	Paket	10%	Inspektorat	APBD					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Pake t	99.246.644	3	Paket	12.183.127	1	Paket	10.463.650	0	-	0	7.327.700	0	Paket	7.327.700	0,00%	Paket	70,03%	30%	Paket	20%	Inspektorat	APBD					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58	Pake t	380.969.274	24	Paket	65.778.600	12	Paket	49.637.700	3	2.609.500	3	13.748.000	6	Bulan	16.357.500	50,00%	Bula n	32,95%	52%	Bulan	22%	Inspektorat	APBD					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	30	Pake t	297.329.060	24	Paket	35.018.350	2	Paket	30.834.000	0	-	1	8.975.000	1	Paket	8.975.000	50,00%	Paket	29,11%	83%	Paket	15%	Inspektorat	APBD					

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra, Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi						Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)						
				(5)			(6)			(7)			(8)						(9)									(10-12/5 x 100%)					
				K	Satu an	Rp	K	Satu an	Rp	K	Satu an	Rp	K	Satu an	Rp	K	Satu an	Rp	K	Satu an	Rp	K	Satu an	Rp				K	Satu an	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)																												(15)	(16)	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7	Doku men	15.772.236	4	Dokum en	2.796.000	2	Doku men	2.796.000	1	-	0	420.000	1	Doku men	420.000	50,00%	Doku men	15,02%	71%	Doku men	20%	Inspektorat	APBD						
			Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	5	Pake t	103.714.080	2	Paket	11.325.000	1	Paket	19.540.000	0	-	1	19.146.200	1	Paket	19.146.200	100,00%	Paket	97,98%	60%	Paket	29%	Inspektorat	APBD						
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lapo ran	87.831.900	24	Lapora n	14.034.500	12	Lapor an	10.865.000	3	-	3	4.116.000	6	Bulan	4.116.000	50,00%	Bula n	37,88%	50%	Bulan	21%	Inspektorat	APBD						
			Penyenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lapo ran	745.143.169	24	Lapora n	150.320.297	12	Lapor an	129.491.600	3	1.260.000	3	32.835.700	6	Bulan	34.095.700	50,00%	Bula n	26,33%	50%	Bulan	25%	Inspektorat	APBD						
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20	Doku men	107.009.949	8	Dokum en	17.461.400	4	Doku men	17.303.600	0	-	1	1.402.500	1	Doku men	1.402.500	25,00%	Doku men	8,11%	45%	Doku men	18%	Inspektorat	APBD						
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Doku men	21.435.800	4	Dokum en	3.795.000	2	Doku men	2.659.800	0	225.000	0	-	0	Doku men	225.000	0,00%	Doku men	8,46%	40%	Doku men	19%	Inspektorat	APBD						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Jenis	2.377.850.717	7	Jenis	1.844.736.484	3	Jenis	133.015.600	0	-	2	101.500.000	2	Jenis	101.500.000	66,67%	Jenis	76,31%	64%	Jenis	82%	Inspektorat	APBD						
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	-	1	unit	418.000.000	0	unit	-	0	-	0	-	0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	100%	unit	100%	Inspektorat	APBD						
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	unit	-	3	unit	919.500.000	-	unit	-	0	-	0	-	0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	100%	unit	100%	Inspektorat	APBD						
			Pengadaan Mebel	64	unit	-	64	unit	-	0	unit	-	0	-	0	-	0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	0%	unit	0%	Inspektorat	APBD						
			Pengadaan Perlakuan dan Mesin Lainnya	165	unit	2.011.995.329	81	unit	347.742.137	0	Unit	-	0	-	0	-	0	Unit	0	0,00%	Unit	0,00%	49%	Unit	17%	Inspektorat	APBD						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan lainnya	17	unit	365.855.388	11	unit	159.494.347	16	Unit	121.113.800	0	-	7	93.000.000	7	Unit	93.000.000	43,75%	Unit	76,79%	100%	Unit	69%	Inspektorat	APBD						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	Lapo ran	942.159.182	6	Lapora n	124.727.053	37	Unit	11.901.800	0	-	1	8.500.000	1	Unit	8.500.000	2,70%	Unit	71,42%	47%	Unit	14%	Inspektorat	APBD						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lapo ran	3.616.650	24	Lapora n	127.000	3	Lapor an	159.668.400	3	12.351.106	3	60.014.473	6	Lapor an	72.365.579	100,00%	Lapor an	45,32%	50%	Lapor an	2004%	Inspektorat	APBD						

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Trivulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)	
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)						(9)						(10-12/5 x100%)						(15)	(16)	
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	(14=12/5 x100%)		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	586.305.000			77.414.049	12	Laporan	650.000	3		-	3	56.000		6	Bulan	56.000		50,00%	Bulan	8,62%	50%	Bulan	13%	Inspektorat			APBD	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	342.237.532			47.186.004	12	Laporan	111.005.600	3		8.348.254	3	39.944.213		6	Bulan	48.292.467		50,00%	Bulan	43,50%	50%	Bulan	28%	Inspektorat			APBD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27	Jenis	3.147.541.110			449.755.244	12	Laporan	48.012.800	3		4.002.852	3	20.014.260		6	Bulan	24.017.112		50,00%	Bulan	50,02%	63%	Bulan	15%	Inspektorat			APBD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	58.829.989			10.397.049	5	Jenis	302.026.000	5		3.045.500	5	99.023.024		10	Jenis	102.068.524		100,00%	Jenis	33,79%	100%	Jenis	191%	Inspektorat			APBD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29	Unit	383.450.602			42.234.500	1	Unit	39.950.000	1		800.000	0	5.247.999		1	Unit	6.047.999		100,00%	Unit	15,14%	76%	Unit	13%	Inspektorat			APBD	
			Pemeliharaan Mebel	20	Unit	113.948.200			2.100.000	6	Unit	85.560.000	6		2.245.500	0	14.948.790		6	Unit	17.194.290		100,00%	Unit	20,10%	130%	Unit	17%	Inspektorat			APBD	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395	Unit	364.107.620			43.503.000	58	Unit	48.402.000	13		-	7	10.925.000		20	Unit	10.925.000		34,48%	Unit	22,57%	45%	Unit	15%	Inspektorat			APBD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	2.110.972.955			337.334.695	1	Unit	106.894.000	0		-	0	65.601.235		0	Unit	65.601.235		0,00%	Unit	61,37%	40%	Unit	19%	Inspektorat			APBD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya	124	Unit	116.231.744			14.186.000	24	Unit	21.220.000	14			1	2.300.000		15	Unit	2.300.000		62,50%	Unit	10,84%	52%	Unit	14%	Inspektorat			APBD	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Insektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
9. Pelaksaaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Inspektorat Kabupaten Purworejo telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada tugas pokok yang dimiliki, adapun tujuan yang ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Birokrasi yang Bersih melalui Pengawasan Internal yang Berkualitas”** dan **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dari tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja yang telah sesuai kaidah penentuan indikator yang jelas, terukur, relevan dengan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat akan dicapai melalui 2 (dua) program yang berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat dan 1 (satu) program penunjang, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan internal;
Sampai dengan triwulan II target 65,21%, telah terealisasi kinerja kegiatan pengawasan internal sebesar 46,64%.
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
Sampai dengan triwulan II target 43,63%, telah terealisasi kinerja kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar 50,61%.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan indikator :
 - Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
Sampai dengan triwulan II target 22,54%, telah terealisasi kinerja perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sebesar 23,14%.
 - Persentase hasil pendampingan dan asistensi
Sampai dengan triwulan II target 59,57%, telah terealisasi kinerja kegiatan pendampingan dan asistensi sebesar 57,04%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
 - Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sampai dengan triwulan II target 49,56 %, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 52,41 %.

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian realisasi target kinerja Inspektorat s/d Triwulan II Tahun 2024. Permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
sampai dengan Triwulan II

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Adanya mandatory penugasan yang terbatas waktu dan prioritas akan tetapi belum masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berakibat mundurnya jadwal penugasan lain yang sudah tersusun. Selain itu juga terdapat perubahan desain penugasan dan perubahan obyek pemeriksaan kinerja sesuai Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko hasil konsultasi dengan BPKP
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Adanya mandatory pengawasan tujuan tertentu yang belum masuk didalam PKPT murni dan harus dilaksanakan, kegiatan audit investigasi dan PKKN dilaksanakan berdasar permohonan Masyarakat dan permintaan APH yang masuk.
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tim Penyusun Perumusan Kebijakan belum selesai dalam menyusun draft pedoman/SOP pengawasan sehingga belum bisa ditetapkan.
	Pendampingan dan Asistensi	Adanya perubahan desain subkegiatan SPIP dan terdapat kegiatan mandatory yang harus dilaksanakan dan belum masuk dalam PKPT.
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyesuaikan agenda penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang diedarkan oleh pemerintah daerah.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapat perubahan total jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai akibat kenaikan pangkat dan purna tugas beberapa pegawai dan adanya penambahan

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan
		PPPK baru pada bulan mei yang belum teranggarkan.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Beberapa rencana diklat yang akan diikuti oleh pegawai inspektorat dibatalkan oleh penyelenggara karena sesuatu hal dan adanya perubahan jumlah pegawai yang direncanakan mengikuti diklat/bintek.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdapat keterlambatan proses pengadaan barang jasa untuk pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga perubahan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya rasionalisasi dan efisiensi pengadaan barang jasa untuk pengadaan AC, Laptop dan Proyektor sesuai kebutuhan.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapat kenaikan tarif dasar listrik dan air minum sampai dengan bulan Desember
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan servis dan perbaikan berdasar kondisi Barang milik daerah yang kan dipelihara. Beberapa BMD kondisinya masih baru dan baik sehingga hanya memerlukan pemeliharaan ringan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo, Inspektorat merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya hal yang kritis terkait pelayanan Inspektorat adalah mempertahankan kinerja yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu **“Tingkat Maturitas SPIP** dengan target yang ditetapkan. Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya meliputi :

1. Keterbatasan jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan, pendampingan dan asistensi.
2. Belum meratanya standar kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pemeriksaan;
3. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal di lingkungan pemerintah daerah.
4. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal;
5. Belum optimalnya fungsi *consulting* Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/ Kota
6. Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Kabupaten/ Kota
7. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama

Dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo tentunya akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah apabila tidak diatasi secara cepat dan tepat. Pencapaian Target Misi ke 4 yaitu Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance) akan menjadi tidak optimal, dimana salah satu indikator sasaran yang harus dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai pelaksana unsur pengawasan mempunyai fungsi dan bertanggung jawab atas capaian nilai Maturitas SPIP minimal level 3 dengan target pada tahun 2024 sebesar 3,13 dan mencapai nilai 3,50 pada tahun 2026.

Secara umum terdapat beberapa peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purworejo , yaitu:

1. Penguatan Peran Inspektorat yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Dukungan penganggaran dari pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
5. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
6. Penguatan Sarana prasarana pendukung kinerja pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Inspektorat yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan Kapasitas dan kualitas fungsional pengawasan (Auditor dan PPUPD) dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Optimalisasi koordinasi fungsi pembinaan, pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

4. Penerapan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko belum maksimal dilaksanakan oleh perangkat daerah.
5. Meningkatnya partisipasi pengawasan masyarakat dan tuntutan pelayanan publik atas pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan.
6. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penerapan Kendali Mutu Pengawasan sesuai pedoman yang berlaku.
7. Pembangunan Budaya Integritas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 berpedoman pada program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan internal (target 100%);
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu (target 100%)
 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan indikator :
 - Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (target 100%).
 - Persentase hasil pendampingan dan asistensi (target 100%).
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
 - Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (target 100%)
- 3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan didalam rencana kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo didasarkan pada pencapaian visi misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, adapun Inspektorat Kabupaten Purworejo mendukung misi 4 yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

3.1.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Inspektorat Kegiatan/Sub Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Pengawasan Desa;
 - Kerjasama Pengawasan Internal;
 - Monitoring dan Eavaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- c. Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - Perumusan Kabijakan Tehnis di Bidang Pengawasan;
 - Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
- d. Pendampingan dan Asistensi;
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- g. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

3.1.3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung Pengarusutamaan Gender.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo, terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yang mendukung pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yaitu : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan. Pengawasan Desa, Kerja Sama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Dukungan pengarusutamaan gender dapat dilihat pada setiap penyusunan komposisi tim yang ditugaskan dalam setiap pengawasan yang melibatkan semua unsur fungsional pengawasan yang ada tanpa ada perbedaan sesuai kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing. Susunan tim secara umum dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Penanggungjawab Tim;

Adalah Inspektur Pembantu (Irban), kondisi saat ini terdiri dari lima Inspektur Pembantu dengan jenis kelamin satu perempuan dan empat laki-laki.

2. Pengendali Teknis (DALNIS)

Adalah Pejabat Fungsional Auditor Madya/Pejabat Fungsional P2UPD Ahli Madya, kondisi saat ini terdiri dari dua pengendali teknis berjenis kelamin perempuan dan tiga pengendali teknis berjenis kelamin laki-laki.

3. Ketua Tim

Dari dua belas tim pemeriksa pada lima Inspektur pembantu tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan dalam penunjukan ketua Tim.

4. Anggota Tim

Dari dua belas tim pemeriksa hampir rata-rata terdiri dari dua anggota tim yang dijabat oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) berjenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Kedudukan dalam tim yang melaksanakan tugas pengawasan didasarkan atas surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Inspektur, sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing yang dijabarkan dalam program kerja pengawasan dan anggaran waktu, serta dilengkapi dengan pakta integritas yang ditandatangani masing-masing anggota tim.

Dukungan lain yang dilakukan Inspektorat terhadap Pengarusutamaan Gender adalah pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Berbasis Gender. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menilai efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pada Bappedalitbang. Ruang lingkup evaluasi meliputi Perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Perangkat Daerah sejak disusunnya Renstra, Renja, program dan kegiatan Bappedalitbang. Melalui evaluasi ini diharapkan Pengarusutamaan Gender berjalan efektif sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Selain itu juga terdapat kegiatan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas seluruh pegawai pada Inspektorat Kabupaten Purworejo. Pemilihan jenis pelatihan dan pendidikan dilakukan sesuai kebutuhan penugasan. Semua pegawai baik laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama yaitu

sebanyak 2 kali untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Melalui kegiatan ini diharapkan fungsional dan pelaksana memiliki kompetensi dan kapabilitas yang unggul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Inspektorat.

3.1.4. Program/Kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan targetnya

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan Triwulan II sesuai perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan perkiraan awal serta keperluan mendesak lainnya mengakibatkan perlu dilakukannya penyesuaian pagu anggaran, penghapusan kegiatan/ sub kegiatan, penyesuaian indikator dan target. Adapun Penjelasan program/ kegiatan yang mengalami perubahan penyesuaian indikator dan target dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Hasil Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Purworejo

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	a
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	a
6	01	01	2	01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	a
6	01	01	2	01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	a
6	01	01	2	01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	a
6	01	01	2	01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	a
6	01	01	2	01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	a
6	01	01	2	01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3 Laporan	a
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
6	01	01	2	02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	64 Orang/bulan	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	a
6	01	01	2	02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	a
6	01	01	2	02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	a
6	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
6	01	01	2	03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	a
6	01	01	2	03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
6	01	01	2	05	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	a
6	01	01	2	05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	120 Orang	a
6	01	01	2	05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	130 Orang	a
6	01	01	2	05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	100 Orang	a
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
6	01	01	2	06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	a
6	01	01	2	06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	a
6	01	01	2	06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	a
6	01	01	2	06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	a
6	01	01	2	06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	a
6	01	01	2	06	00 07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	a
6	01	01	2	06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	a
6	01	01	2	06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	a
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 Jenis	3 Jenis	a
6	01	01	2	07	00 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	a
6	01	01	2	07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	7 Unit	a
6	01	01	2	07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37 Unit	2 Unit	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	a
6	01	01	2	08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	a
6	01	01	2	09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	5 Unit	a
6	01	01	2	09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	68 Unit	a
6	01	01	2	09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	a
6	01	01	2	09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	26 Unit	a
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	100 %	a
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan pengawasan internal	7 Dokumen	7 Dokumen	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	02	2	01	00 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan	119 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96 Laporan	137 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 03	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 04	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	71 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 05	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	83 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	3 Kesepakatan	a
6	01	02	2	01	00 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelenggaranpengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan penyelenggaranpengawasan dengan tujuan tertentu	2 Laporan	2 Laporan	a
6	01	02	2	02	00 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	4 Laporan	a
6	01	02	2	02	00 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	115 Laporan	a
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Daerah	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Daerah	100 %	100 %	a
6	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	a
6	01	03	2	01	00 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	a
6	01	03	2	01	00 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil dan Pendampingan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil dan Pendampingan Asistensi	4 Laporan	4 Laporan	a
6	01	03	2	02	00 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	a
6	01	03	2	02	00 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	190 perangkat daerah	182 perangkat daerah	a
6	01	03	2	02	00 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	3 Kegiatan	a
6	01	03	2	02	00 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangkat daerah	165 perangkat daerah	a

Untuk perubahan pagu pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Pada Tabel 3.2 diatas yang merupakan tabel rencana kerja hasil input dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) hanya mencantumkan capaian program, hasil/sasaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan, sedangkan Sasaran Program, Keluaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN, DAN SASARAN SUB KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
24	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan
29	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara pada tahun tertentu
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan
i	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersusunnya laporan, kesepakatan, dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal
40	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
41	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
42	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja
43	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan
44	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa
45	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal
46	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
ii	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tersusunnya Laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
47	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
48	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
i	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
49	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
50	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
ii	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi dan jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi
51	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
52	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
53	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
54	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 3.2 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. PURWOREJO
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																		Nasional		Daerah	TARGET		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						INSPEKTORAT						15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00						16.480.610.313,00			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00						16.480.610.313,00			
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00						16.480.610.313,00			
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	11.948.527.853,00	12.201.503.238,00	11.974.851.031,00							12.620.979.703,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 dokumen	3 dokumen	48.487.200,00	38.509.000,00	38.509.000,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		53.335.920,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	31.438.200,00	25.325.900,00	22.141.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			34.582.020,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel			0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Kel/Desa	Umum		, dan kapabel				
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	1.705.000,00	1.705.000,00	805.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel			1.875.500,00	INSPEKTORAT

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal		Dacrah	Targ et		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Kel/Des a	Umu m		, dan kapabel				
	6	0 1	0 1	2.0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3 Laporan	15.344.000,00	11.478.100,00	4.370.300,00	Kab. Purwore jo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel			16.878.400,00	INSPEKTO RAT
	6	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	9.440.268.553 ,00	9.889.283.838 ,00	9.889.283.838 ,00			-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel	Aparatu r		9.632.966.213 ,00	INSPEKTO RAT
	6	0 1	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	64 Orang/b ulan	9.425.582.253 ,00	9.877.505.788 ,00	9.406.041.601 ,00	Kab. Purwore jo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel			9.616.811.283 ,00	INSPEKTO RAT
	6	0 1	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.194.400,00	5.426.150,00	2.365.800,00	Kab. Purwore jo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel			7.913.840,00	INSPEKTO RAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																		Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	4.027.900,00	4.027.900,00	2.227.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			4.430.690,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				26 Laporan	26 Laporan	3.464.000,00	2.324.000,00	524.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			3.810.400,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	4.693.600,00	4.693.600,00	4.693.600,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		5.162.960,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	2.027.400,00	2.027.400,00	1.427.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			2.230.140,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																		Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	2.666.200,00	2.666.200,00	2.066.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			2.932.820,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.421.559.500,00	1.377.659.350,00	1.377.659.350,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		1.563.715.450,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	119.569.000,00	79.661.500,00	70.169.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			131.525.900,00	INSPEKTORAT
	6					NON URUSAN							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00						16.480.610.313,00		
	6	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00						16.480.610.313,00		
2	6	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	11.948.527.853,00	12.201.503.238,00	11.974.851.031,00							12.620.979.703,00	
	6	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.421.559.500,00	1.377.659.350,00	1.377.659.350,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel	Aparatur		1.563.715.450,00	INSPEKTORAT

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			, dan kapabel					
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	120 Orang	0,00	0,00	1.513.791.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			1.400.208.260,00	INSPEKTORAT	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00					16.480.610.313,00				
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00					16.480.610.313,00				
3	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	11.948.527.853,00	12.201.503.238,00	11.974.851.031,00							12.620.979.703,00		
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.421.559.500,00	1.377.659.350,00	1.377.659.350,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		1.563.715.450,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	130 Orang	11.029.400,00	9.696.750,00	16.550.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			12.132.340,00	INSPEKTORAT	

No	Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	100 Orang	18.044.500,00	15.384.500,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			0,00	INSPEKTORAT	
		NON URUSAN																		
6									15.683.029,45	15.528.446,73	15.155.568,89							16.480.610,31		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
6	0 1								15.683.029,45	15.528.446,73	15.155.568,89							16.480.610,31		
4	6 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	11.948.527,85	12.201.503,23	11.974.851,03							12.620.979,70		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.421.559,350	1.377.659,350	1.377.659,350				Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		1.563.715,450	INSPEKTORAT	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
6									15.683.029,45	15.528.446,73	15.155.568,89							16.480.610,31		
		INSPEKTORAT DAERAH																		
6	0 1								15.683.029,45	15.528.446,73	15.155.568,89							16.480.610,31		
5	6 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	11.948.527,85	12.201.503,23	11.974.851,03							12.620.979,70		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	346.024.600,0	296.647.450,0	296.647.450,0				Pewujudan tata kelola pemerintahan	Aparatur		380.627.060,0	INSPEKTORAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		han yang bersih, akuntabel , dan kapabel					
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.658.800,00	8.906.900,00	8.906.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			13.924.680,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.149.200,00	14.149.200,00	14.149.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			15.564.120,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	12.420.500,00	10.463.650,00	10.969.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			13.662.550,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.856.000,00	49.637.700,00	49.635.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			72.441.600,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		akuntabel, dan kapabel				
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.019.100,00	30.834.000,00	20.436.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			38.521.010,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			0,00	INSPEKTORAT
	6					NON URUSAN							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00						16.480.610.313,00		
	6	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00						16.480.610.313,00		
6	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	11.948.527.853,00	12.201.503.238,00	11.974.851.031,00							12.620.979.703,00	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	346.024.600,00	296.647.450,00	296.647.450,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		380.627.060,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00							16.480.610.313,00					
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							15.683.029.453,00	15.528.446.738,00	15.155.568.897,00							16.480.610.313,00					
7	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	11.948.527.853,00	12.201.503.238,00	11.974.851.031,00							12.620.979.703,00					
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	346.024.600,00	296.647.450,00	296.647.450,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		380.627.060,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																					
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			21.494.000,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																					
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.865.000,00	10.865.000,00	16.165.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			11.951.500,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.586.600,00	129.491.600,00	95.598.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			165.645.260,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	18.333.600,00	17.303.600,00	17.303.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			20.166.960,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																				
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.799.800,00	2.659.800,00	1.732.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			4.179.780,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	-			2 Jenis	3 Jenis	215.906.000,00	133.015.600,00	133.015.600,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		242.275.550,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	4.344.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang			4.778.950,00	INSPEKTORAT			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																		Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																an, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum		bersih, akuntabel, dan kapabel				
	6	0	0	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	7 Unit	193.539.700,00	121.113.800,00	121.113.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			212.893.670,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				37 Unit	2 Unit	22.366.300,00	11.901.800,00	18,621,700.00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			0,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	159.668.400,00	159.668.400,00	159.668.400,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		175.635.240,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	650.000,00	650.000,00	150.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			715.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.005.600,00	111.005.600,00	125.079.656,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			122.106.160,00	INSPEKTORAT							
	6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.012.800,00	48.012.800,00	48.034.274,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			52.814.080,00	INSPEKTORAT							
	6	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-			5 Jenis	5 Jenis	311.920.000,00	302.026.000,00	302.026.000,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		567.261.310,00	INSPEKTORAT							
	6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.950.000,00	39.950.000,00	43.960.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			43.945.000,00	INSPEKTORAT							
	6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasio nal				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	5 Unit	85.560.000,00	85.560.000,00	81.710.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			94.116.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	68 Unit	48.402.000,00	48.402.000,00	48.400.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			53.242.200,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	116.788.000,00	106.894.000,00	141.911.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			128.466.800,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	26 Unit	21.220.000,00	21.220.000,00	27.045.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			247.491.310,00	INSPEKTORAT	
10	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal				100 %	100 %	1.966.065.400,00	1.802.107.900,00	1.735.052.766,00							1.914.350.790,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	6	0	0	2	0	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan pengawasan internal	-			7 Dokumen	7 Dokumen	1.612.969.200,00	1.475.951.050,00	1.475.951.050,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel	Aparatur		1.526.853.570,00	INSPEKTORAT			
	6	0	0	2	2	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																0001				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				100 Laporan	119 Laporan	224.992.100,00	203.187.650,00	233.295.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			0,00	INSPEKTORAT				
	6	0	0	2	2	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																0002				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				96 Laporan	137 Laporan	152.050.800,00	136.103.050,00	215.616.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			167.255.880,00	INSPEKTORAT				
	6	0	0	2	2	0	Reviu Laporan Kinerja																0003				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	37.554.200,00	22.708.300,00	20.896.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			41.309.620,00	INSPEKTORAT				
	6	0	0	2	2	0	Reviu Laporan Keuangan																0004				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	71 Laporan	131.656.600,00	109.173.750,00	101.134.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			144.822.260,00	INSPEKTORAT			
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				98 Laporan	83 Laporan	280.679.400,00	268.721.300,00	309.468.216,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			308.747.340,00	INSPEKTORAT			
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																				
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	3 Kesepakatan	46.823.700,00	41.048.350,00	37.751.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			51.506.070,00	INSPEKTORAT			
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																				
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	6 Dokumen	739.212.400,00	695.008.650,00	516.090.300,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel			813.212.400,00	INSPEKTORAT			
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-			2 Laporan	2 Laporan	353.096.200,00	326.156.850,00	326.156.850,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan	Aparatur, Masyarakat		387.497.220,00	INSPEKTORAT			

1

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																				Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			han yang bersih, akuntabel , dan kapabel					
	6	0	0	2	2	00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	
								Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	4 Laporan	84.010.200,00	77.983.650,00	52.884.950,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			92.411.220,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2	2	00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				52 Laporan	115 Laporan	269.086.000,00	248.173.200,00	247.915.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel			295.086.000,00	INSPEKTORAT
11	6	0	0				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				100 %	100 %	1.768.436.200,00	1.524.835.600,00	1.445.665.100,00							1.945.279.820,00	
	6	0	0	2	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			2 Dokumen	2 Dokumen	127.805.700,00	78.627.600,00	78.627.600,00			-	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel , dan kapabel	Aparatur		140.586.270,00	INSPEKTORAT
	6	0	0	2	1	00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
								Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	96.433.000,00	56.676.400,00	72.356.500,00	Kab. Purworejo, Semua	Dana Transfer Umum	-	Pewujudan tata kelola pemerintah			106.076.300,00	INSPEKTORAT

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
																				Nasio nal	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	Kecamat an, Semua Kel/Des a	m-Dana Aloka si Umu m		han yang bersih, akuntabel , dan kapabel				
	6	0	0	2	0	00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	
								Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomen dasi	3 Rekomen dasi	31.372.700,00	21.951.200,00	9.040.200,00	Kab. Purwore jo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m	-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel			34.509.970,00	INSPEKTO RAT
	6	0	0	2	0		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	-			4 Laporan	4 Laporan	1.640.630.500 ,00	1.446.208.000 ,00	1.446.208.000 ,00			-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel	Aparatu r, Masyara kat		1.804.693.550 ,00	INSPEKTO RAT
	6	0	0	2	0	00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				6 perangka t daerah	6 perangka t daerah	17.320.000,00	15.302.100,00	10.557.100,00	Kab. Purwore jo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m	-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel			19.052.000,00	INSPEKTO RAT
	6	0	0	2	0	00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				190 perangka t daerah	182 perangka t daerah	516.406.800,0 0	414.407.400,0 0	366.115.600,0 0	Kab. Purwore jo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si	-	Pewujuda n tata kelola pemerinta han yang bersih, akuntabel , dan kapabel			568.047.480,0 0	INSPEKTO RAT

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai penyempurnaan Renja yang telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang belum terencana sebelumnya. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo. Perubahan Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Catatan Penting.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 yaitu :

1. Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun pada awal tahun belum dapat maksimal dikarenakan adanya penugasan-penugasan mandatori prioritas yang harus dilaksanakan.
2. Adanya penyesuaian desain aktifitas kegiatan yang harus menyesuaikan pedoman pelaksanaan yang baru.
3. Penyesuaian pagu program dan kegiatan akibat adanya perubahan-perubahan tersebut diatas dilakukan dengan rekomposisi dan efisiensi pagu anggaran tahun berjalan.

4.2. Kaidah-Kaidah

Kaidah-kaidah dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Memperhatikan Evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun berjalan.
2. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan belum terakomodir dalam Renja Tahun 2024.
3. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Isu-isu strategis yang telah ditetapkan.
5. Proses penyusunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 antara lain :

1. Mengoptimalkan sarana, sumber daya dan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 akan dijadikan acuan dalam rangka penyusunan anggaran sehingga kebutuhan-kebutuhan yang belum terakomodir dapat terdanai. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis.

